



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|-------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Koran Sindo |

Masih Ada Alternatif Lain untuk Kurangi Kemacetan

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai, rencana penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan belum mendesak untuk saat ini. Pasalnya, jika tujuannya untuk mengurangi kemacetan maka masih ada alternatif lain yang bisa dioptimalkan. Misalnya, perluasan ganjil genap dan peningkatan layanan transportasi umum.

"Sehingga tidak membebani masyarakat. Selain itu, jalan berbayar berpotensi hanya memindahkan kemacetan dari titik satu ke titik yang lain, potensi masalah tersebut juga menjadi *concern* Komisi B," tegas Ismail kemarin.

Politikus PKS ini membenarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) yang mengatur jalan berbayar di 25 ruas jalan akan dibahas DPRD Maret mendatang. Pembahasan tersebut sesuai dengan usulan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang ditetapkan tahun sebelumnya. Menurutnya, DPRD DKI pasti memperhatikan penolakan berbagai unsur masyarakat terhadap kebijakan jalan berbayar dan menjadikannya sebagai pertimbangan saat pembahasan raperda. "Keberatan masyarakat tersebut akan menjadi pertimbangan," ujarnya.

Ismail menyebutkan, dari seluruh pengguna kendaraan yang melewati 25 ruas jalan ber-ERP per hari diperkirakan mendapat pemasukan Rp30 miliar. Jika dikalikan dua alias pulang pergi dengan arus pengendaraan sebaliknya maka pemasukannya dua kali lipat. "Kami dapat informasi, tidak kurang per hari sekitar Rp30-60 miliar dana yang masuk. Satu trip itu Rp30 miliar, berarti dua kali (perjalanan) sekitar Rp60 miliar," ungkapnya.

Karena pemasukan yang tergolong besar, Ismail mengaku, akan melakukan konfirmasi lanjutan kepada Dishub DKI Jakarta terkait usulan

nilai tarif ERP sebesar Rp5.000-Rp19.000 untuk sekali lewat. "Kami akan mempertanyakan dasarnya dari mana angka tersebut, pasti harus ada hitung-hitungannya," tutur Ismail.

Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mendorong Pemprov DKI mengatur pengecualian jalan berbayar untuk moda transportasi *online*. Sebab kebijakan tersebut akan berdampak terhadap nasib ojek *online* (ojol). Apalagi saat ini layanan pemesanan makanan melalui aplikasi *online* sangat signifikan di Ibu Kota. "Kami memandang perlu adanya pengaturan khusus terkait moda transportasi *online*. Hampir di banyak kantor para pegawai menggunakan jasa *online* untuk memesan makanan. Mobilisasi masyarakat juga kian banyak terbantu dengan layanan ini," ujar anggota Fraksi NasDem DPRD DKI itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta penerapan jalan berbayar tidak dilakukan terburu-buru. Zita meminta Pemprov DKI mempersiapkan transportasi umum yang lebih baik untuk masyarakat. "Kalau niatnya untuk mengurangi kemacetan dan beralih ke transportasi umum, saya pikir baik. Tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan Pemprov. Satu, transportasi umum kita, sudah siap atau belum? Kedua, tarif," kata Zit.

Penasihat Fraksi PANDPRD DKI itu menyebut armada transportasi umum di DKI belum mencukupi. Selain itu, dia menyebut angkutan publik belum ramah untuk wanita.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya akan memperbaiki layanan transportasi umum di Ibu Kota. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan menuju diberlakukannya jalan berbayar elektronik. Rencana penerapan ERP ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) yang

akan dibahas DPRD DKI bersama Pemprov DKI.

Salah satu moda angkutan umum yang bakal ditingkatkan pelayanannya adalah bus Transjakarta. Dia berencana mempersingkat durasi antar-kendaraan (*headway*) demi memberikenyamanan pada pelanggan. "Kan konsepnya sama-bil proses itu (penyusunan Raperda PLE), Pemda DKI juga harus merapikan misal Transjakarta bisa melayani dengan baik, *headway* diperketat dan seterusnya," ujar Heru.

Sementara untuk ERP disebutnya masih harus melewati tahapan yang cukup panjang. Namun, dia meyakini jajarannya bisa menyelesaikannya hingga jalan berbayar diterapkan segera mungkin. "ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya, *kan* seperti itu," ucapnya.

Heru menyebut setidaknya ada tujuh tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya kebijakan ini dijalankan. Tahapan pertama adalah pembahasan Raperda PLE di DPRD. Setelah itu masuk ke pembahasan penyusunan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Perda tersebut. Pergub ini diperlukan karena berisi pelaksanaan atau teknis dari penerapan ERP di Jakarta. "Diproses lagi untuk bisnisnya. Nanti siapa yang mengelola badan usahanya apa, itu juga dibahas dengan DPRD," ucapnya.

Tahapan selanjutnya adalah penentuan jalan mana saja yang akan menerapkan ERP. Beberapa titik memang sudah ditentukan berdasar sejumlah kriteria yang diatur dan selanjutnya dibahas lagi di DPRD. Barulah tahapan ke enam adalah melakukan penentuan tarif. Sejauh ini kisaran biaya ERP yang diperkirakan adalah Rp5.000 sampai Rp19.900. Tahapan terakhir atau ketujuh adalah membahas keseluruhan rencana dengan pemerintah pusat.

□ **faorickpakhahan/
sabrirlaluhu/
anandanararya**